
KOLABORASI PESERTA LATSAR DALAM KEGIATAN AKTUALISASI (STUDI KASUS: AKTUALISASI PESERTA LATSAR DI BKPSDMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

*(Basic Training Participant Collaboration In Actualization Activities
(Case Study: Actualization Of Basic Training Participant At
BKPSDMD Province Of Bangka Belitung Islands))*

Atpriatna Utama

(BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

e-mail: atpriatna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi peserta Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada 2 aspek yang dilakukannya peserta latihan dasar: tugas sesuai fungsi jabatan dan tugas aktualisasi sebagai peserta latihan dasar, dengan melakukan kegiatan aktualisasi yang inovasi di tempat kerja sebagai solusi pemecah masalah unit kerja. Fenomena kegiatan ini cukup menarik untuk diteliti, guna mengetahui bagaimana kolaborasi sebagai tuntutan *core value* Pegawai Negeri Sipil saat melaksanakan aktualisasinya. Penelitian metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Triangulasi sumber data dari observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk menjaga kredibilitas data. Informan dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan narasumber 5 (lima) orang termasuk objek penelitian, atasan langsung, kepala bidang kepala subbidang, dan rekan kerja. Penelitian menemukan bahwa kegiatan aktualisasi peserta latihan dasar telah berhasil mengeliminasi permasalahan, faktor kolaborasi aktor, penggunaan *google apps* dan dominasi pemimpin sebagai penguatan keberhasilan. Pelaksanaan kolaborasi yang tertata apik memberikan motivasi *team* dan *stakeholders* untuk mengeksekusi kesepakatan, aplikasi *google* yang *usability*, *monitoring* dan evaluasi dan *passion* dari pimpinan.

Kata Kunci: Kolaborasi, Peserta Latsar, Aktualisasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the collaboration of participants in the Basic Training of Candidates for Civil Servants of the Personnel and Human Resources Development Agency of the Bangka Belitung Islands Province. There are 2 aspects that the basic training participants do: tasks according to the function of the position and actualization tasks as participants in basic training, by carrying out innovative actualization activities in the workplace as a solution to solving work unit problems. The phenomenon of this activity is quite interesting to study, in order to find out how collaboration is a demand for the core values of Civil Servants when carrying out its actualization. The research is a qualitative method with a case study approach. Triangulation of data sources from observation, in-depth interviews, and document analysis to maintain the credibility of the data. Informants were selected using purposive sampling method with 5 (five) people as sources including the object of research, direct supervisor, head of sub-sector, and co-workers. The study found that the actualization of basic training participants had succeeded in eliminating problems, actor collaboration factors, the use of google apps and the dominance of leaders as reinforcement of success. The well-organized implementation of collaboration motivates the team and stakeholders to execute the agreement, usability Google applications, monitoring and evaluation and passion from the leadership.

Keywords: Collaboration, Participants, Actualization.

A. PENDAHULUAN

Mengutip Pidato Presiden, beliau mengaskan bahwa setiap ASN sebagai pegawai pusat dan daerah dengan berbagai profesi dan tugas mempunyai orientasi pelayanan yang melayani dengan sumber daya yang diberikan kepada ASN. Selanjutnya beliau juga menyampaikan permasalahan yang ada, tidak bisa diselesaikan hanya satu dinas saja atau satu keahlian, permasalahan perlu diselesaikannya dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan tidak boleh ada ego atau *metal silo*. Mengingat hal tersebut maka orientasi ASN memiliki *core value* ASN yaitu “BerAKHLAK” yang memiliki akronim Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Pendapat senada disampaikan (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020) adanya kolaborasi yang melibatkan multi organisasi sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan pada instansi yang tidak bisa diselesaikan sendirian. Selanjutnya organisasi membuat kebijakan secara formal untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan atau program publik dan aset.

Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dapat diibaratkan sebagai mata air dahaga, ungkapan tersebut bukan sekedar isapan jempol bagi peserta latsar CPNS. Mengutip dari mentor yakni atasan langsung dari peserta latsar “kami sangat terbantuan dengan adanya mereka, mereka berkerja lebih cepat, tanggap dan memiliki banyak ide yang bisa mereka eksekusi sendiri”.

Fenomena hadirnya CPNS telah membawa gelombang perubahan yang sangat cepat sebagai *digital native* yang dianggap sarat dengan teknologi mereka mendorong perubahan kinerja birokrasi pemerintahan pada segmen kinerja dan pelayanan manual menjadi digital. Sugiyartanto dan Windra Mariani dalam sambutannya pada pembukaan Latsar

CPNS mengatakan sebagai calon penyelenggara negara perlu kemampuan yang baik untuk mewujudkan akselerasi pelayanan dan inovasi, CPNS bisa membentuk sikap responsif terhadap tuntutan yang penuh dinamika juga mampu memberikan solusi yang kreatif – inovatif.

Dalam hasil Prosiding Hadiono mengatakan perkembangan teknologi yang cepat membawa organisasi harus mempersiapkan diri untuk transformasi digital, artinya organisasi harus menerima perubahan-perubahan secara masif, dan tentunya proses transformasi digital melibatkan banyak sumber daya (Hadiono & Santi, 2020). Penerapan data digital paling dikenal dan mudah penggunaan saat ini adalah *google apps*. Dari penelitian (Andrew, 2019) menemukan bahwa aplikasi *google apps* dapat memberikan kemudahan pengguna dalam bekerja sama dari lokasi yang berbeda, dan aspek kolaboratif dalam membagi aktifitas belajar antar sesama pengguna. Ditambah dengan adanya integrasi aplikasi *google* membuat pengingat alur kerja secara otomatis, mudah digunakan dan biaya murah (Luo, 2018). Manfaat *google apps* juga dirasakan dari bidang proses pembelajaran, meskipun ada bertentangan dari pengguna namun *google apps for education* banyak memberikan manfaat yang besar bagi guru selama proses belajar mengajar antara lain interaksi dengan siswa, mengelola dan menilai tugas murid (Lindh, Nolin, & Hedvall, 2016).

Fungsi organisasi perangkat daerah memberikan dukungan atas fungsi dan kewajibannya sebagai pelaporan kinerja, laporan yang tepat waktu dalam penyelesaiannya, namun dilapangan proses tersebut mengalami hambatan yang berasal dari keterlambatan penyampaian data realisasi kinerja pada bidang organisasi untuk proses lebih lanjut. Keterlambatan pelaporan kinerja ini secara sistimatis. Peserta latsar yang langsung melakukan tugas bidang sesuai penempatannya diharapkan harus bisa

melakukan tugas yang diberikan oleh atasan dan diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan, seperti dari pernyataan sub-koordinator yang mengatakan “mereka dalam bertugas pertamapun saya langsung memberikan tugas sesuai dengan tupoksinya, karena permasalahan di seksi kami dengan banyak tugas yang belum bisa dilaksanakan mengingat kurangnya waktu dan tenaga pegawai”.

Kegiatan peserta mengimplementasikan tugas aktualisasi didesain untuk menyelesaikan permasalahan pada bidang tugas, dan tentunya berhasil atau tidak, tidak lepas dari kemampuan peserta berkolaborasi secara vertikal dan horizontal. Pengelolaan kolaborasi dalam administrasi melibatkan partisipan/*stakeholders*, tentunya melewati beberapa tahapan seperti *timing* yang tepat untuk memulai, memperhitungkan bagaimana proses berlangsung, dengan siapa berkolaborasi, pemegang kebijakan, *team* yang akan terlibat, sosialisasi informasi dan konsisten melaksanakan kesepakatan (Sufianti, 2011). Dan tentunya kolaborasi tidak lepas dari ketentuan dalam setiap keterlibatan *stakeholders*, kolaborasi pemerintahan memiliki aturan yang mengatur satu atau lebih elemen pelayanan dalam keterlibatan secara langsung dalam proses keputusan, memiliki orientasi terhadap konsensus untuk melaksanakan kebijakan publik dan program (Nurani & Wike, 2021).

Bagi peserta latsar pertama menginjak kakinya di birokrasi pemerintahan tentunya membentuk kolaborasi menjadi tantangan, baik dari internal atau eksternal. Komunikasi, rasa sungkan, tidak percaya diri menjadi tantangan pertama yang dirasakan oleh pegawai baru. Tantangan akan menjadi sulit dikarenakan peserta men-*delivery* kegiatan baru inovatif ke dalam organisasi, tantangan atau hambatan bisa terjadi adanya sikap menolak dari rekan kerja, sulit berinteraksi, miskomunikasi atau mungkin bisa saja

cercaan. Hal serupa dikatakan Rohmah bahwa tantangannya tentang miskordinasi antar rekan kerja dan pemberian wewenang yang masih terorganisir (Rohmah & Harsono, 2020).

Berdasarkan tulisan diatas, dapat diidentifikasi perlunya penelitian ini dilakukan, seperti untuk mengetahui bagaimana kolaborasi peserta CPNS dalam lingkungan yang baru dan keterlibatan *stakeholders*, dan bagaimana peserta mampu men-*delivery* kegiatan inovasinya ke organisasi.

B. METODE PENELITIAN

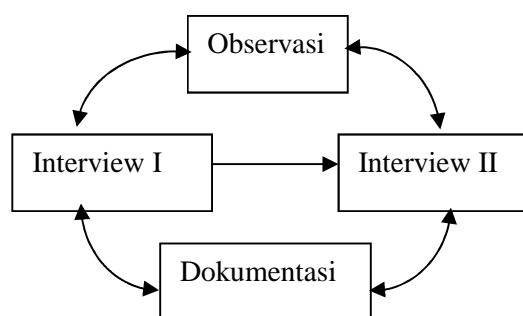
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, terhadap kegiatan kolaborasi peserta CPNS yang mengimplementasikan kegiatan aktualisasi tahun 2020 khusus pada sub bidang perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, data yang diperoleh dari;

- a. Hasil *Interview*, dilakukan juga terhadap kepala organisasi dan kepala bagian yang terkait sebagai narasumber inti, juga pada peserta sebagai objek penelitian/terlibat langsung terhadap penelitian (narasumber primer), *interview* juga dilakukan terhadap 5 (lima) koresponden dari rekan kerja yang terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan.
- b. Dokumentasi, dengan membaca dokumen aktualisasi, memeriksa hasil kegiatan aktualisasi dan laporan kinerja.
- c. Hasil Observasi, melakukan pengamatan terhadap kegiatan narasumber primer, partisipan, dan lingkungan pada pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan aktualisasi pada waktu yang berbeda.

Untuk memeriksa kebenaran data/keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi pada pengumpulan data.

Mengikuti pendapat Sugiyono yang dikutip oleh (Pradistya, 2021) triangulasi diperlukan untuk “*mentracking* ketidaksamaan data” yang berasal dari berbagai sumber. Data yang diperoleh berfungsi saling melengkapi, bilamana dianggap belum lengkap, menimbulkan ambigu, dan tidak ada konsistensi dari data yang ada maka dapat dicari dengan observasi dan dokumentasi (Rahardjo, 2017). Penelitian dari (Zamili, 2015) mengatakan triangulasi terhadap: sumber data, metode, teori untuk tujuan menverifikasi data dan inteprestasi. Menurut Zamili cara triangulasi sebagai kredibilitas penelitian.

Data-data *interview* yang diperoleh dari narasumber utama *dicross-cek* sebagai validasi dengan data yang diperoleh dari dokumentasi kemudian data tersebut diobservasi pada kondisi lingkungan secara objektif. *Interview* dilakukan kembali kepada 4 (empat) narasumber sekunder untuk klarifikasi data awal yang diperoleh. Selanjutnya apabila data yang diperoleh sudah jenuh. Jenuh dinilai dengan tidak ditemukan lagi data atau informasi yang baru, sehingga tidak bisa merubah analisa selanjutnya (Zamili, 2015).



Gambar 1.

Pola Triangulasi Sumber Data Penelitian.

Pengamatan dilakukan selama kegiatan aktualisasi peserta dan hanya melibatkan sekelompok kecil orang, ini dilakukan untuk melihat secara obyektif dengan pengamatan dilakukan secara periodik terhadap objek penelitian saat melakukan interaksi kolaborasi.

C. KERANGKA TEORI

Peserta latsar yang ditempatkan di organisasi perangkat daerah merupakan peserta yang dianggap memiliki kompetensi bidangnya. Argumen tersebut dilatarbelakangi dengan adanya seleksi administrasi, kompetensi dasar dan kompetensi bidang, selain itu tiap-tiap peserta wajib lulus *passing grade*. Terakhir integrasi nilai seleksi kemampuan dasar dan kemampuan bidang dengan persentase 40:60 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya para peserta CPNS yang lulus ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan, yang tentunya diharapkan dapat melakukan kegiatan didalam bidang teknis secara profesional, sesuai dalam Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 terkait dengan pelatihan dasar CPNS.

Sebagai peserta Latihan Dasar (Latsar) yang rentang umur 25 tahun – 5 tahun dan lebih dari 75,5 % mereka pemakai *internet* dan pernah menggunakan aplikasi *internet* (Khaira, Dirgahayu, & Hidayat, 2021) tentunya sudah mengenal *google* dan menjadi bagian gaya hidup mereka, kebutuhan akan informasi dan gaya hidup dapat dengan mudah diakses dengan media teknologi *internet* dan situs *web google*. Mengutip dari (Abdel-Reheem Amin, 2020) atas penelitian *Systematic Literature Review* yang dilakukannya mengatakan perkembangannya menjadi *google apps* yang diperlukan bagi bisnis, kerja/tugas, pendidikan termasuk *google* penterjemahan. *Google apps* juga memberikan konten penyimpanan yang gratis seumur hidup. *Google* juga menjadi ruang kerja yang tiada batas, menjadikan *google apps* sebuah desain integrasi ruang kerja untuk produktifitas dan kolaborasi, dengan produk aplikasi meliputi; *Google Documents*, *Google slides*, *Google Calendar*, *Google Classroom*.

Sebagai langkah awal untuk kolaborasi peserta Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan interaksi individu mereka bisa berdialog, *face to face* (Saleh, 2020). Secara etimologi makna kolaborasi berarti penyatuan tenaga atau kemampuan untuk tujuan bersama, lebih lanjut beliau menuliskan bahwa ada pola dan hubungan yang dilakukan oleh antar individu atau organisasi untuk saling berbagi, berpartisipasi dan bersepakat untuk melakukan secara bersama-sama agar tujuan dapat dicapai (Saleh, 2020). Kolaborasi antar individu juga disampaikan oleh penelitian (Astuti et al., 2020) kegiatan yang terletak pada pengelolaan jaringan sosial, yang menghimpun komunikasi para pemangku kepentingan, dan bagi peserta Latsar CPNS saat memasuki organisasi birokrasi perlu adanya karakter kolaboratif. Sejalan dengan hasil penelitian dari (Nisak & Wardhani, 2019) menemukan bahwa kolaborasi adalah strategi kunci untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama.

Keterampilan kolaborasi antara lain harus mempunyai kemampuan komunikasi, mampu mendengar secara aktif, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab (Alison, 2020). Kolaborasi merupakan hubungan timbal balik para peserta dalam upaya berkoordinasi untuk memecahkan masalah bersama-sama. Sifat interaksi kolaborasi dicirikan adanya tujuan bersama, struktur, negosiasi tingkat tinggi, interaksi, dan saling ketergantungan (Phan, Rivas, & Song, 2011).

Penelitian terkait kolaborasi aplikasi *google* juga dilakukan (Cahyani, 2016), kolaborasi secara *real time* antara mahasiswa sebagai *digital native* dan dosen dipandang sebagai *digital immigrant* dalam mengadopsi teknologi *google for education*. Hasil menunjukkan bahwa dosen junior menjadi *fasilitator* *delivery* teknologi pembelajaran yang digunakan. Namun hasil sejalan dengan beda generasi, upaya kolaborasi mampu menjadi upaya

yang baik dalam mengadopsi *google for education*.

Penelitian lain yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat menemukan bahwa kolaborasi berjalan dengan baik dimulai dengan adanya komponen 1. prinsip bersama, 2. motivasi bersama dan 3. bentuk kapasitas bersama, dan tindakan kolaborasi yang dilakukan sesuai dengan kapasitas masing masing *stakeholders* (Luqito & Arrozaaq, 2016).

Jadi dipahami bahwa kolaborasi adalah kerjasama yang melibatkan setiap individu untuk melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan dan visi yang sama dengan adanya interaksi yang melibatkan kemampuan dan komunikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan kinerja aparatur daerah bukan milik satu orang saja atau milik pemimpinnya, namun menjadi bagian akuntabilitas organisasi, dengan adanya sistim pengelolaan dan pelaporan yang baik sehingga memberikan informasi yang relevan (Rizal, Fitri, & Rantika, 2019).

Peta keterlibatan aktor dalam Pelaporan Kinerja.

Tabel 1.

Peta *Stakeholders* dalam Pelaporan Kinerja.

Kategori	Stakeholders	Aktualisasi
1,2,3,4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN	<i>Google Apps.</i>
1,2,3,4	Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	<i>Google Apps.</i>
1,2,3,4	Bidang Pengembangan SDM	<i>Google Apps.</i>
Kategori 1. Realisasi fisik dan Keuangan Bulanan		
Kategori 2. Laporan Realisasi fisik dan keuangan Triwulan		

Kategori 3. Pemetaan Indikator Renstra

Kategori 4. Rencana Anggaran Kas

Kolaboratif Peserta.

Aksi pertama yang dilakukan oleh peserta dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan atasan peserta yakni kepala badan dan kepala subbidang perencanaan sebagai atasan langsung peserta. Dalam koordinasi ini peserta mencoba mengemukakan solusi terkait permasalahan yang terjadi di subbidang perencanaan, yang tentunya dengan data dan rancangan dari solusi yang akan dilakukannya. Kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan atasan ini penting sebagai langkah strategis untuk memperdalam informasi sebagai konsolidasi selanjutnya.



Gambar 2.

Konsultasi Internal Peserta dengan atasan.

Gambar 2 menunjukkan diskusi antara peserta dengan kepala subbagian perencanaan sebagai langkah awal kegiatan aktualisasi, dalam dialog ini peserta telah menyiapkan isu yang terjadi terkait dengan tugas dan fungsi, design *portofolio* strategi pemecahan isu, jadwal dan waktu pelaksanaan dan *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi.

Dengan adanya diskusi terjadi interaksi yang bersifat kolaborasi peran atasan sebagai *leader* dan peserta sebagai eksekutor. Menurut (Nuwita & Sulistiowati, 2021) koordinasi bisa melalui dialog dialog *non formal* tetapi masih dalam

koridor tugas, tidak kaku dengan yang bersifat resmi.

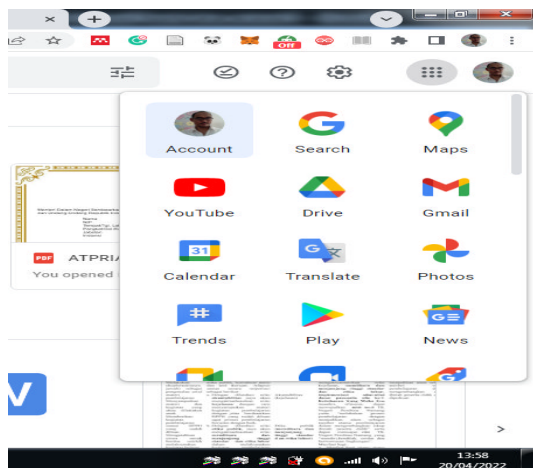
Goals dialog koordinasi adalah adanya legalitas peserta untuk melakukan kegiatan inovatif, memberikan legitimasi kepada peserta untuk melakukan kolaborasi koordinasi terhadap *stakeholders*, dan adanya komitmen bersama untuk kolaborasi terhadap kegiatan aktualisasi.

Kebutuhan Perubahan.

Perubahan yang dilakukan oleh peserta pada Laporan Kinerja yang selama ini dikenal sebagai akar permasalahan dari ekosistem pelaporan kinerja. Subbagian perencanaan tidak akan bisa mengerjakan laporan kinerja organisasi perangkat daerah berkala yang diakibatkan oleh terlambatnya *deadline* penyampaian laporan dari bidang-bidang ke sub bagian perencanaan. Keterlambatan diidentifikasi karena mobilisasi pemberkasan dengan menggunakan manusia, pemberkasan dokumentasi bersifat *paper/kertas*, *human error* dan kompleksitas.

Membentuk *team* kolaborasi dari berbagai unsur seperti kepala bidang internal OPD sebagai koordinator dan subbidang sebagai eksekutor bidang. Kepala bidang berfungsi memastikan bahwa pelaporan dari subbidang-subbidang lainnya berjalan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Eksekutor bertugas untuk menginput dan memastikan proses penginputan berjalan tepat waktu.

Tindakan yang *transformatif* terhadap permasalahan menggunakan integrasi *google drive*, *google calender*, *google*, *google sheet*, *google contact*.



Gambar 3.
Google apps yang digunakan.

Google drive sebagai penyimpanan data base dari subbagian perencanaan sebagai koordinator data dan data yang masuk dari stakeholders bagian organisasi perangkat daerah (OPD) internal dan eksternal.

Google Calender digunakan untuk manajemen waktu yang diimplementasikan berubah notifikasi monitor, notifikasi jadwal input, jadwal eksekusi, jadwal pengiriman dan jadwal lainnya terkait dengan kinerja pelaporan OPD.

Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun dan disahkan oleh Kepala Badan selaku pimpinan tinggi organisasi, yang digunakan sebagai pedoman operasional yang legal dan wajib bagi seluruh komponen team. SOP akan memastikan operasional berjalan dengan baik, tepat waktu dan hasil yang maksimal. Menurut (Nuwita & Sulistiowati, 2021) SOP untuk mengukur kinerja yang berkaitan dengan program dan waktu, SOP juga untuk menilai akuntabilitas, responsivitas dan responsibilitas organisasi.

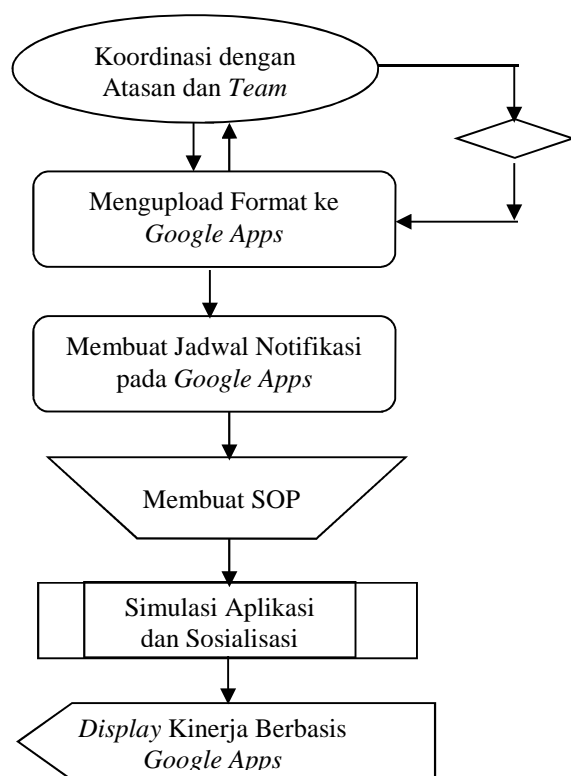


Gambar 4.
Standar Operasional Prosedur Interaksi Google Apps Pelaporan Kinerja.

SOP berisi kualifikasi bagi pelaksanaan terdiri atas: Mengetahui tugas pokok dan fungsi perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada unit kerja; memiliki kemampuan memproses komputer; memiliki kemampuan mencatat, merekap dan menganalisa kertas kerja; memiliki kemampuan menyusun laporan pengendalian dan evaluasi rencana kerja perangkat daerah. SOP dilengkapi dengan : dokumen Renstra; Dokumen Renja; Laporan Keuangan/SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran; Komputer dan printer.

Aktualisasi.

Pelaksanaan kegiatan hasil inisiasi peserta latsar yaitu integrasi google apps dilakukan secara efektif selama 1 (satu) bulan. Setelah dilakukan pra-aktualisasi seperti mencari akar permasalahan menemukan kegiatan solutif, membentuk team yang terdiri dari komponen PNS dan Pegawai Harian Lepas (PHL) bidang terkait, dan mengkontruksikan integrasi google apps. Selanjutnya mengaktualisasi kegiatan inovasi peserta tersebut seperti: peserta melakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk konsolidasi dan memperkuat team dan tata laksana kegiatan aktualisasi, melakukan praktek dan penerapannya secara langsung integrasi google apps.



Gambar 5. Tahapan Aktualisasi.

Manfaat dan Hambatan.

Kegiatan aktualisasi Integrasi *Google Apps* secara umum dapat dikatakan berhasil seperti komentar Sekretaris Badan “kegiatan yang dilakukan peserta sangat membantu kinerja pelaporan seperti laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan realisasi keuangan organisasi...ya semuanya terkait dengan laporan-laporan dari bidang-bidang ke subbidang perencanaan sebagai tugas dan fungsinya”, lebih lanjut beliau mengatakan “peserta sudah memberikan hal yang luar biasa dengan hanya aplikasi yang sederhana dan gratis, ini inovasi”.

Ditegaskan kembali manfaat dari komentar subbidang yang lain bahwa “ya benar, banyak manfaat bagi kami rasakan, bagi saya yang melaporkan setiap kemajuan pekerjaan ini sangat membantu, yang dulu kami harus menggunakan kertas sekarang tidak lagi, cuma input di *google sheet* terus kirim, dan kami juga diingatkan jadwal pelaporan jadi meminimalkan

resiko keterlambatan”.

Subbagian perencanaan mengomentari “pimpinan selalu melihat realisasi kinerja untuk melihat sejauh mana capaian kinerja ini juga sebagai bentuk *control* pimpinan” selanjutnya beliau mengatakan “kalo dulu kita manual dan mendatangi mereka perlu waktu, namun dengan hening sebagai peserta mempermudah proses pengumpulan data dari bidang-bidang, pemimpin kegiatan, dari *google* itu juga ada notifikasi sebagai pengingat dan *monitoring* terhadap bidang lainnya”.

Dari narasi diatas diketahui banyak manfaat secara langsung dirasakan oleh *stakeholders* seperti: ketepatan waktu penyelesaian laporan; kemudahan input data ke format yang telah disetting sebelumnya dengan *google sheet*; karena ini menggunakan jaringan *internet* dan informatika tentunya hambatan ini bersifat teknologi atau teknis. Hambatan yang dirasakan seperti lambatnya proses

pengiriman *loading*, atau terputusnya koneksi *internet* dan kesalahan teknis pengisian dan intruksi. Terlepas dari semua hambatan dan adanya tantangan inovasi dari peserta latsar CPNS mampu memberikan alternatif solusi pemecahan masalah pada pelaporan kinerja/keuangan.

Keberhasilan dari kegiatan aktualisasi peserta tidak lepas dari adanya pengaruh intervensi dari pimpinan badan yaitu Kepala Badan BKPSDMD sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari kegiatan. Kepimpinan bukan hanya sebagai sosok *leadership* namun juga *motivator-fasilitator*, seperti penelitian (Muizu, Kaltum, & Sule, 2019) kepemimpinan dan motivasi kerja yang dibangun pemimpin berpengaruh signifikan terhadap kinerja baik pada unit unit kecil organisasi pada tugas fungsi internal, bahkan kinerja pada organisasi dengan tugas eksternal yang lebih kompleks.

Pembahasan.

Meskipun pelaporan sudah menjadi kegiatan rutin tahunan secara periodik namun hambatan tetap saja terjadi, adanya kegiatan aktualisasi yang melibatkan peserta latsar CPNS menjadi *booster* percepatan kinerja pelaporan dan secara prinsip menjadi suatu yang sangat diperlukan untuk memberikan solusi praktis terhadap permasalahan pada unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peserta Latsar mampu membawa inovasi praktik dengan upaya berkolaborasi, hal itu menjadi keharusan bagi mereka, kolaborasi bukan hanya pada interaksi sosial namun juga mampu berkolaborasi terhadap organisasi dan lingkungan.

Peran kepemimpinan dan motivasi dari sosok Pemimpin menjadi peran utama untuk mencapai keberhasilan kegiatan dan program. Pemimpin dalam kolaborasi menjadi inisiatif berkolaborasi, inisiatif pertemuan, sebagai *fasilitator* dan mediator, menjadi aktor kolaborasi dan memiliki komando penggunaan sarana prasarana, dan advokasi ke publik.

Banyaknya aplikasi berbasis teknologi informatika namun tidak sepenuhnya juga digunakan organisasi pemerintah, kecenderungan menggunakan anggaran lebih menarik dibandingkan dengan aplikasi gratis yang siap pakai. Dengan merujuk kegiatan aktualisasi peserta Latsar yang menggunakan *google apps* menjadi solusi permasalahan, ini menunjukkan bahwa *tools* yang gratis sekalipun mampu memberikan kontribusi yang besar bagi organisasi, karena peserta memiliki latar belakang pengalaman terkait dengan *tools* tersebut dan adaptif terhadap lingkungannya.

E. PENUTUP

Organisasi Perangkat Daerah tentunya perlu memberikan motivasi secara umum bagi seluruh ASN, banyak potensi –potensi

yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dimasa era *society 5*.

Proses belajar merupakan proses yang luar biasa dalam membentuk karakter yang adaptif sebagai solusi dari setiap permasalahan pelayanan pada birokrasi. Sikap dan karakter kolaborasi bagi Pegawai Negeri Sipil perlu adanya sejalan dengan nilai *core value* PNS. Kolaborasi mampu menyelesaikan permasalahan birokrasi yang cenderung “*silo*” dan menjadi solusi pelayanan kepada masyarakat. Asumsi bahwa kolaborasi sulit menjadi tantangan bagi aktor kolaboratif, namun dengan cara yang sederhana dan biaya murah tujuan kolaborasi bisa tercapai sehingga permasalahan pada organisasi dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Reheem Amin, E. (2020). A Review of Research into Google Apps in the Process of English Language Learning and Teaching. *Arab World English Journal (AWEJ)*, 11(1), 2020. <https://doi.org/10.24093/awej/vol11no1.27>
- Alison, D. (2020). Collaboration Skills: What Are They? Retrieved February 15, 2022, from www.thebalancecareers.com website: <https://www.thebalancecareers.com/collaboration-skills-with-examples-2059686>
- Andrew, M. (2019). *Collaborating online with four different google apps: Benefits to learning and usefulness for future work*. *Journal of Asia TEFL*, 16(4), 1268–1288. <https://doi.org/10.18823/ASIA TEFL.2019.16.4.13.1268>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*.

- Cahyani, I. P. (2016). Adopsi Google Apps For Education di Perguruan Tinggi : Sebuah Kolaborasi Real-Time Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 19(3).
- Hadiono, K., & Santi, R. C. N. (2020). Menyongsong Transformasi Digital. *Seminar Nasional Sendi-U Ke-6*, 978–979. Proceeding SENDI_U 2020.
- Khaira, M., Dirgahayu, R. T., & Hidayat, T. (2021). Analisis Penyebab Rendahnya Penggunaan Dompot Elektronik (E-Wallet) Berdasarkan Kelompok Umur Di Indonesia. *Jurnal Sains Komputer & Informatika*, 5(September), 627–640.
- Lindh, M., Nolin, J., & Hedvall, K. N. (2016). View of Pupils in the clouds: Implementation of Google Apps for Education | First Monday. *First Monday*, 21(4). Retrieved from <https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/6185/5355>
- Luo, J. (2018). Using Google apps to manage embargo records: Automating institutional repository reminders. *College & Research Libraries News*, 79(3), 137. <https://doi.org/10.5860/crln.79.3.137>
- Luqito, D., & Arrozaaq, C. (2016). *Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo*.
- Muizu, W. O. Z., Kaltum, U., & Sule, E. T. (2019). Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. *PERWIRA-Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, 2(1), 70–78.
- Nisak, A. C. C., & Wardhani, A. R. (2019). Sosial Kolaborasi Antar Divisi R & D Dengan Divisi Produksi Pada PT. XYZ. *Seminar Nasional Hasil Riset, (Ciastech)*, 57–66.
- Nurani, F., & Wike. (2021). Building Collaborative Governance on Services Delivery for Children. *Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*, 191(AICoBPA 2020), 471–473. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210928.089>
- Nuwita, M. S., & Sulistiowati, R. (2021). *Koordinasi Antar Stakholder dalam Pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langkah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*. 3(3), 267–280.
- Phan, H. T., Rivas, J., & Song, T. (2011). *Collaboration: a Literature Review Research Report*.
- Pradistya, R. M. (2021). Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif. Retrieved from www.dqlab.id website: <https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>
- Rahardjo, M. (2017). Mengenal Lebih Jauh tentang Studi Kasus. Retrieved April 18, 2022, from www.uin-malang.ac.id website: <https://www.uin-malang.ac.id/r/100501/mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html>
- Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(01), 20. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>
- Rohmah, P., & Harsono, D. (2020). *Collaborative Governance Optimization in Supervision Division of Manpower and Transmigration Office of the Special Region of Yogyakarta*. <https://doi.org/10.4108/ea.i.4-8-2020.2302438>

Saleh, C. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. In *Modul Kolaborasi Pemerintah* (pp. 1–62).

Sufianti, E. (2011). *Perencanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*. VIII(3), 322–329.

Zamili, M. (2015). Menghindari Dari Bias: Praktek Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304.